

TAFSIR HERMENEUTIKA POLITIK ATAS GEJALA DEMOKRASI VERSUS DINASTI PADA PILKADA SERENTAK 2015

Dewi Masyitha*

Abstract: *Regional head and deputy regional head (Election) simultaneously is an important moment trip democracy in Indonesia. ELECTIONS simultaneously are the implications of Law No. 1 Year 2015 about Governor and Deputy Governor Elections, Regent and Vice Regent, Mayor and Deputy Mayor are set by Parliament. However, democracy at the local or regional level has the potential to be capitalistic, emotional and transactional. ELECTION tends to only be a handful of people who have space access powerful in the world of politics, in order to perpetuate its power among them are a political dynasty. It is certainly a threat to democracy. The writer through hermeneutic approach explained that the actual political dynasty in law and legislation, it is not wrong. However, when viewed from the side of political ethics, leadership regeneration, utilization of natural resources, improvement of people's welfare, and opportunities for other people, especially from ordinary citizens, the political dynasty will be unhealthy. Political dynasty tends to be used to perpetuate power and an arena for the accumulation of personal wealth coffers of the state money. Moreover, political dynasty is very potential for a worse bureaucratic accountability.*

Keywords: *Hermeneutika, Demokrasi dan Politik Dinasti*

PENDAHULUAN

Pada 17 Februari 2015, DPR mengesahkan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota disahkan. Pada 17 April 2015, KPU *launching* Pilkada serentak tahapan pelaksanaan pilkada 9 Desember 2015. Ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerahnya. Adapun pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap. Pilkada serentak tahap pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilakukan pada Pebruari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, Pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model Pilkada serentak pada 2027.

KPU selama menyelenggarakan Pilkada, selain fokus pada aspek “bebas-rahasia”, KPU menciptakan pilkada *zero conflict*. Dalam mendorong kondisi itu, transparansi, keterbukaan informasi dan menjaga integritas merupakan prinsip KPU yang harus terus diperjuangkan.¹

Brian C. Smith dan Robert Dahl para pemerhati demokrasi mengatakan, tentang *local accountability*, *politicaequity*, dan *local responsiveness* yang menjadi pertarungan setiap daerah. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat

* Dosen Tetap STAI AL-YASINI Pasuruan

¹ Suara KPU, 4.

sejauhmana pemerintahan di daerah berjalan. Bahwa untuk memperkuat demokrasi di aras lokal, Pilkada serentak merupakan mekanisme untuk melahirkan Pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya, kesetaraan hak warga dalam berpolitik serta bagi penguatan demokrasi nasional. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) serentak merupakan momentum penting perjalanan demokrasi di tanah air. Demokrasi di aras lokal dalam satu dekade yang terasa makin kapitalistik, emosional dan transaksional menyandarkan kita akan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien, mengedepankan akal sehat, derajat kompetisi yang seimbang tanpa mengurangi makna kedaulatan rakyat.²

Apakah benar apa yang diungkapkan Brian C. Smith dan Robert Dahl? Selama ini Pilkada cenderung hanya menjadi ruang segelintir orang yang punya akses kuat dalam dunia politik, dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya. Seperti kasusnya Ratu Atut. Di Jawa Timur wakil gubernur Saifullah Yusuf mempunyai adik bernama Irsyad Yusuf menjadi Bupati Pasuruan. Lebih spesifik lagi di kota Pasuruan walikotanya bernama Hasani anaknya bernama Ismail jadi ketua DPRD Kota Pasuruan dan empat saudaranya yang lain menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan.

Terpilihnya Ratu Atut sebagai gubernur Banten, Saifullah Yusuf sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Irsyad Yusuf sebagai bupati Pasuruan, dan Hasani sebagai Walikota Pasuruan serta Ismail menjadi ketua DPRD Kota Pasuruan adalah sah sesuai prosedural KPU dan ini demokratis pilihan rakyat daerah lokal. Namun apakah benar ini pilihan rakyat murni? Bagaimana sekeluarga menjadi kepercayaan masyarakat secara berbarengan. Hal ini mirip politik kerajaan ataupun dinasti.

Kebingungan pemahan makna praktik politik demokrasi yang berwujud dinasti inilah perlu kita kaji bersama bagaimana makna demokrasi dan teknokrasi sesungguhnya secara hermeneutika?

Tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada masyarakat dalam hal kesadaran untuk memilih pemimpinnya secara sadar sesuai kapabilitasnya pada pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember mendatang. Tidak ada transaksi tetapi pilihan yang rasional.

POLITIK DINASTI DI INDONESIA

Politik dinasti atau dinasti politik bukanlah hal baru di Indonesia, sejak Orde Baru sampai sekarang, Indonesia diwarnai politik dinasti, diakui atau tidak, Indonesia dipenuhi oleh politisi yang masih memiliki hubungan keluarga, satu dengan lainnya. Kita lihat Presiden ke II Republik Indonesia, Soeharto membangun dinasti politiknya hingga bertahan sampai 32 Tahun, dan membangun kekuatan kapitalnya dengan memanfaatkan kewenangannya melalui dinastinya.

Dinasti Politik juga dibangun pasca Soeharto lengser dan digantikan dengan era Reformasi, setelah Gusdur menjabat sebagai Presiden, terdapat beberapa nama yang memiliki hubungan keluarga dengan Gusdur, walau tidak sebanyak Pak Harto. Namun dinasti Gusdur tidak bertahan lama dan tidak

² Ibid., 5.

sebanyak sebelumnya. Megawati sebagai simbol trah Bung Karno Presiden pertama dan Proklamator Republik Indonesia, Megawati pun membangun dinasti politik di republik ini, melalui Partai PDIP dan beberapa keluarganya berkiprah di partai lain. Megawati dengan dinasti cukup mewarnai negeri ini. Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia adalah anak kandung Bung Karno dari Fatmawati, dilanjutkan saudarinya Rachmawati, ketua Partai Pelopor dan pernah menjabat Dewan Pertimbangan Presiden, ada Sukmawati Soekarno Putri merupakan ketua partai PNI Marhens. Juga ada nama Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau yang dikenal dengan Putin Guntur Soekarno, yang tiada lain adalah keponakan Megawati. Selanjutnya ada nama Guruh Soekarno Putra yang merupakan adik kandung Megawati, serta ada nama Alm.suami Megawati yaitu Bapak HM Taufiq Kiemas, dan anak kandung Megawati Puan Maharani yang menjabat ketua Fraksi PDIP di DPR RI, dan Prananda Megawati sebagai ketua departemen DPP PDIP. Jika dirunut lagi masih ada nama-nama yang terkait dengan keluarga besar Megawati.

Dinasti selanjutnya, diwariskan dan dibangun oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhono. Ia memiliki beberapa keluarga di berbagai posisi, baik di politik, meliter maupun di swasta atau BUMN. Kita sebut nama Hadi Hutomo yang tiada lain sebagai ipar SBY sebagai ketua umum Demokrat Pertama, Edhi Baskoro Yudhoyono, anak SBY sebagai Sekjen Partai Demokrat dan caleg DPR RI, Sartono Hutomo (sepupu SBY) Dapil Jatim VII, Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY) Dapil Banten III, Agus Hermanto (adik ipar SBY) Dapil Jateng I, dan lainnya, yang merupakan bagian dari dinasti Cikeas.

Dinasti yang paling hangat yang sedang menjadi perbincangan saat ini adalah dinasti Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Dinasti yang dibangun oleh anak Jawara Banten ini, Chasan Shohib yang terkenal di Provinsi Banten. Chasan Shohib karena jawaranya, sangat disegani rakyat Banten,. Anak keturunan Chasan Shohib, yang sekarang menguasai Banten, mulai dari anak Shohib, Ratu Atut menjadi Gubernur Banten dua periode, dan belum lagi isteri-isterinya yang menjadi pejabat. Anaknya, cucunya, semuanya menikmati berkah dari kekuasaan. Chasan Shohib tergolong berhasil membangun dinasti kerajaan di Banten.

Banyak kerabat Atut yang dulunya tidak terkenal menduduki jabatan strategis di Provinsi tersebut, yaitu, ibu tiri Atut, Heryani jadi Wakil Bupati Pandeglang; adik Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat Wakil Bupati Serang; adik tiri Atut, TB. Haerul Jaman, Walikota Serang; adik ipar Atut, Airin Rachmy Diani Walikota Tangerang Selatan. Selain di eksekutif, keluarga Ratu Atut juga tersebar di legislatif mulai tingkat kabupaten sampai nasional. Suami Atut, Hikmat Tomet anggota DPR RI; anak Atut, Andika Hazrumy anggota DPD; menantu Atut, Ade Rossi Khaerunisa anggota DPRD Kota Serang; ibu tiri Atut, Ratna Komalasari DPRD Kota Serang; Aden Abdul Cholik adik ipar Atut, jadi anggota DPRD Provinsi Banten.

Di Jawa Timur, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf mempunyai adik bernama Irsyad Yusuf menjadi bupati Pasuruan. Lebih spesifik lagi politik dinasti ternyata terjadi di Kota Pasuruan Hal itu terjadi setelah dua anak, seorang menantu, dan seorang keponakan Hasani dilantik sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan

TEORI HERMENEUTIKA

Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani; *hermeneuein*, yang artinya diterjemahkan "menafsirkan", kata bendanya *hermeneia* yang berarti "tafsiran". Dalam tradisi Yunani kuno kata *hermeneuein* dipakai dalam tiga makna, yaitu mengatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*). Dari tiga makna ini, kemudian dalam kata Inggris diekspresikan dengan kata: *to interpret*. Dengan demikian perbuatan interpretasi menunjuk pada tiga hal pokok, pengucapan lisan (*an oral recitation*), penjelasan yang masuk akal (*areasonable explanation*), dan terjemahan dari bahasa lain (*a translation from another language*), atau mengekspresikan.

Menurut istilah, hermeneutika biasa dipahami sebagai: "*the art and science of interpreting especially authoritative writings; mainly in application to sacred scripture, and equivalent to exegesis*" (seni dan ilmu menafsirkan khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan sama sebanding dengan tafsir). Ada juga yang memahami bahwa hermeneutika merupakan sebuah filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan "*understanding of understanding* (pemahaman pada pemahaman)" terhadap teks, terutama teks Kitab Suci, yang datang dari kurun, waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi para pembacanya.

Istilah hermeneutika sering dihubungkan dengan nama *Hermes*, tokoh dalam mitos Yunani yang bertugas menjadi perantara antara Dewa Zeus dan manusia. Namun dalam perkembangan selanjutnya definisi hermeutika ini mengalami perkembangan, yang semula hermeneutika dipandang sebagai ilmu tentang penafsiran (*science of interpretation*). Dalam perkembangan selanjutnya definisi hermeneutika menurut Richard E. Palmer dibagi menjadi enam, yakni:

1. Teori penafsiran Kitab Suci (*theory of biblical exegesis*)
2. Sebagai metodologi filologi umum (*general philological methodology*).
3. Sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa (*science of all linguistic understanding*).
4. Sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*methodological foundation of geisteswissenschaften*)
5. Sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (*phenomenology of existence dan of existential understanding*)
6. Sebagai sistem penafsiran (*system of interpretation*).

Keenam definisi tersebut bukan hanya merupakan urutan fase sejarah, melainkan pendekatan yang sangat penting di dalam problem penafsiran suatu teks. Keenam definisi tersebut, masing-masing, mewakili berbagai dimensi yang sering disoroti dalam hermeneutika. Setiap definisi membawa nuansa yang berbeda, namun dapat dipertanggungjawabkan, dari tindakan manusia menafsirkan, terutama penafsiran teks. Tulisan ini mau memberikan kerangka menyeluruh tentang keenam definisi tersebut, yang lebih banyak berfungsi sebagai pengantar pada arti sesungguhnya dari hermeneutika. Tokoh-tokoh Pengembang Hermeneutika adalah Friederich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Gadamer, Husser, Heidegger, Ricoeur

Dalam pandangan Friederich Schleiermacher menyatakan bahwa pemahaman hermeneutika mempunyai dua dimensi, yakni: *pertama*, penafsiran gramatikal, yang berkaitan dengan aspek linguistik yang membentuk batasan-batasan di mana sebuah kegiatan berpikir diatur. Dalam penafsiran ini, pendekatan yang digunakan dengan menggunakan metode komparatif yang bermula dari yang umum ke yang khusus. Penafsiran disebut juga penafsiran obyektif serta dapat juga dikatakan penafsiran negatif. Hal ini disebabkan hanya menunjukkan batas-batas pemahamannya saja. *Kedua*, penafsiran psikologis, yang berusaha menciptakan kembali tindak kreatif yang menghasilkan teks dan kegiatan sosial. Penafsiran psikologi melibatkan penempatan seseorang dalam pikiran penulis atau actor social supaya dapat mengetahui apa yang diketahui oleh seorang penulis atau yang dipersiapkan dalam kegiatan social. Hal ini merupakan proses yang memerlukan banyak tenaga untuk menyusun konteks kehidupan tempat suatu kegiatan terjadi dan mendapatkan makna.

Dalam penafsiran ini, pendekatan yang digunakan dengan metode komparasi dan semacam ramalan. Dalam metode ini pelaku hermeneutika mentransformasikan dirinya dalam diri penulis untuk menggali proses mentalnya. Penafsiran ini disebut juga penafsiran teknis. Melalui penafsiran inilah tugas seorang hermeneutic terpenuhi. Selain disebut sebagai penafsiran teknis, penafsiran ini juga disebut penafsiran positif karena berusaha memahami tindak berpikir yang melahirkan wacana.

Dalam pandangan Dilthey, yang dikenal sebagai filsuf terpenting paruh kedua abad 19, hermeneutika memang bermula dari analisis psikologis akan tetapi akhirnya harus dikembangkan ke konteks sosial yang lebih luas. Dia juga berpendapat bahwa sebuah fenomena harus ditempatkan pada situasi keseluruhan yang lebih luas tempat fenomena tersebut mendapatkan maknanya, bagian-bagian memperoleh pemaknaan dari keseluruhan dan keseluruhan mendapatkan pemaknaan dari bagian-bagian. Jadi yang menjadi penekanannya bergeser dari pemahaman empatik atau rekonstruksi proses mental orang lain ke arah penafsiran hermeneutik tentang produk budaya struktur konseptual.

Menurut Gadamer dalam hermeneutika tertarik pada proses pemahaman. Pemahaman harus diletakkan dalam tradisi historis, suatu waktu dan tempat teks ditulis. Hermeneutika berlangsung di luar analisis teks menuju ke konteks historisnya. Ada tiga pendapat menurutnya tentang hermeneutika yakni:

1. Kegiatan hermeneutika diterapkan pada sesuatu di luar apa yang dikatakan menuju pada sesuatu yang secara alami ketika dikatakan makna sehari-hari dan situasi dimana percakapan itu terjadi.
2. Hermeneutika dilakukan dengan cara memadukan horizon pelaku hermeneutika dan horizon teks sasaran. Benturan dengan horizon lain akan memunculkan kesadaran yang berupa asumsi dan dugaan tentang horizon suatu makna yang belum disadari. Dalam hal ini hermeneutika adalah penjembutan atau mediasi bukannya rekonstruksi.

Pembacaan sebagai bagian dari hermeneutika melibatkan aplikasi sehingga pembaca menjadi bagian dari yang ia mengerti. Karena itu ketermilikan, partisipasi, bahasa sebagai medium berpengalaman tentang dunia adalah landasan yang nyata bagi pengalaman hermeneutika.

Penting di sini untuk mengungkap pemikiran Dilthey yang memiliki kaitan dengan masalah demokrasi dan politik dinasti. Menurut Dilthey, sangat memungkinkan jika seorang penafsir akan bisa memahami pengarang dengan lebih baik dibanding dengan pengarang itu memahami dirinya sendiri. Namun, kondisi tersebut tidak diraih secara otomatis. Untuk mencapai kondisi tersebut, seorang penafsir harus melalui beberapa tahap. Lantaran, pemahaman itu memiliki beberapa tingkat makna. Tingkat makna pertama, pemahaman sebagai menangkap sebuah makna dengan melalui tanda yang menunjukkan atau mewakili apa yang dimaksud (*understanding as grasping of a meaning by way of a sign that stands for or represents what is meant*). Tingkat makna kedua, pemahaman sebagai *nacherleben*, yaitu mengimbas kembali perasaan dan pengalaman yang dipercayai telah dialami oleh pengarang, dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang termanifestasikan dalam ungkapan yang dapat diakses. Seorang penafsir dalam dua tingkat ini belum bisa mencapai tahap *besserverstehen*. Tetapi pada tingkat yang kedua ini, penafsir merasakan persis dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pengarang, tidak kurang dan tidak lebih. Hanya pada tingkat makna yang ketiga dari pemahaman, maka *besserverstehen* dapat diraih. Level makna pada tingkat ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa makna dalam konteks, signifikansi dan implikasi dari sebuah pernyataan, tindakan atau peristiwa tidak pernah bisa tetap dan sempurna.

Sejarah adalah jaringan pola, hubungan dan keterkaitan yang kompleks yang akal seseorang tidak pernah bisa memahaminya secara utuh. Dalam kehidupan, terdapat beragam faktor penting yang tidak disadari. Menangkap faktor-faktor tersebut yang saling terkait merupakan tugas yang tidak pernah usai. Pemahaman manusia mengenai dirinya sendiri dan kekuatan-kekuatan yang berlaku dalam kehidupannya tidak pernah lengkap. Kondisi ini membuka ruang kemungkinan bagi sejarawan untuk selalu meliputi dasar yang sama di masa mendatang untuk mencapai pemahaman yang lebih penuh mengenainya dengan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan tentang keadaan yang lebih lengkap karena biasanya lebih banyak ilmu tersedia setelah bertahun-tahun berlalu. Pemahaman yang lebih lengkap inilah yang menyebabkan *besserverstehen* bisa diraih dan inilah tugas implisit seorang sejarawan.³

Meski banyak terpengaruhi teori penafsiran Schleiermacher, Wilhelm Dilthey tetap memiliki perbedaan penekanan dengan Schleiermacher. Jika Schleiermacher menekankan kepada susunan keseluruhan arsitektonik dalam menafsirkan, maka Dilthey lebih menekankan kepada sejarah. Menurut Dilthey, Schleiermacher telah gagal mempertimbangkan pentingnya perspektif sejarah untuk menyempurnakan tugas hermeneutika, yaitu memahami pengarang lebih baik daripada pengarang tersebut memahami dirinya sendiri.⁴

Dilthey berpendapat hermeneutika Reformasi (*Reformation hermeneutics*) masih belum melepaskan diri sepenuhnya dari bias-bias tradisi dan dogma. Sebabnya, hermeneutika Reformasi masih berkuat pada hubungan antara bagian-

³ *Die Entstehung der Hermeneutik (Kemunculan Hermeneutika)*. Artikel ditulis pada tahun 1900, Lihat makalah Adnin Armas, *Dampak Hermeneutika F. D. E. Schleiermacher dan William Dilthey Terhadap Studi al-Qur'an* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 5.

⁴ *Ibid.*, 5

bagian teks dengan keseluruhan teks, dan penulisan teks masih belum dikaitkan dengan konteks historis yang lebih luas. Dilthey berambisi menjadikan hermeneutika sebagai komponen utama bagi fondasi (*grundlegung*) ilmu humaniora (*geistesswissenschaften*). Ambisi ini menyebabkan Dilthey telah meluaskan penggunaan hermeneutika ke dalam segala disiplin ilmu humaniora. Bahkan segala ungkapan eksternalisasi kehidupan ditangani dengan cara hermeneutika (*all expressions and externalizations of life were to be dealt with by hermeneutical means*). Jadi, dalam pandangan Dilthey, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa dan pengarang tidak memiliki otoritas atas makna teks, tetapi sejarahlah yang menentukan maknanya.⁵

Dilthey, berpendapat bahwa sebuah fenomena harus ditempatkan pada situasi keseluruhan yang lebih luas tempat fenomena tersebut mendapatkan maknanya, bagian-bagian memperoleh pemaknaan dari keseluruhan dan keseluruhan mendapatkan pemaknaan dari bagian-bagian. Jadi yang menjadi penekanannya bergeser dari pemahaman empatik atau rekonstruksi proses mental orang lain ke arah penafsiran hermeneutik tentang produk budaya struktur konseptual.

DEMOKRASI DAN POLITIK DINASTI

1. Demokrasi

Secara Etimologis demokrasi berasal dari kata Yunani "Demos" berarti rakyat dan "Kratos atau Kratein" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi menurut Schumpeter adalah sebuah metode yang dimiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu.⁶ Huntington (1991) menjelaskan bahwa pemilu adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat". Bertolak dari makna ini, sistem politik abad 20 dinilai demokratis apabila "para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur berkala, dan dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara."

Secara Evolusioner demokratisasi di masa modern dikategorikan dalam tiga gelombang :

1. Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926) yang berakar pada revolusi Prancis.
2. Gelombang balik pertama (1922-1942) Ditandai adanya kecenderungan demokrasi yg mengecil dan munculnya rezim otoriter menjelang PD II.
3. Gelombang pendek demokratisasi ke dua (1943-1962) ditandai munculnya lembaga demokrasi di wilayah pendudukan sekutu pada masa PD II.

⁵ Ibid., 6

⁶ Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: PT Intermedia, 1991), 5.

4. Gelombang balik kedua (1958-1975) kembali ke otoriterisme, antara lain di Amerika Latin.
5. Gelombang Demokrasi ketiga (1974-.....) ditandai dengan munculnya rezim demokratis menggantikan rezim totaliter disekitar 30 negara dalam kurun waktu 15 tahun

Dalam konteks teori Huntington (1991), dunia termasuk Indonesia sedang berada dalam gelombang demokrasi ketiga yang dinilainya sangat spektakuler melanda seluruh penjuru dunia.⁷ Isu yang menonjol adalah hubungan timbal balik perkembangan ekonomi dengan proses demokratisasi dan pemerintahan yang demokratis khususnya yang berkaitan dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan implikasinya terhadap hubungan Internasional. Penyiapan warga negara agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab pada ethos demokrasi sebenarnya tidak diwariskan tetapi dipelajari dan dialami.

Latar belakang timbulnya demokrasi, Huntington (1991) memaparkan dalam bukunya bahwa “Korelasi yang tinggi antara agama Kristen Barat dengan demokrasi” disebabkan oleh alasan dimana 68 negara yang dianggap demokratis sebesar 57% merupakan negara yang dominan Kristen Barat, dan hanya 12% dari 58 negara yang dominan agama lainnya merupakan negara demokrasi.⁸ Disimpulkan bahwa demokrasi sangat jarang terdapat di negara di mana mayoritas besar penduduknya beragama Islam, Budha, atau Konfusius.

2. Politik Dinasti

Politik dinasti atau dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebelum munculnya gejala dinasti politik, kelompok elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal, elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktifis.

Menurut Pareto dalam Varma yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah

⁷ Ibid., 8.

⁸ Ibid., 9

yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.⁹

Mosca dalam Varma meneliti komposisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran 'kekuatan sosial' tertentu. Mosca mengenalkan konsep 'sub elite' yang merupakan kelas menengah dari para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Kelas menengah ini dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurutnya stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini. Menurut Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elite. Setiap elite yang memerintah, hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi sirkulasi elite akan tetap berjalan karena secara individual baik elite keturunan maupun elite yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis.¹⁰

Kekuasaan elite menurut Mosca adalah sebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkan dari watak sosial manusia. Selanjutnya dikatakan, bahwa kelas politik yang tidak adaptif dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elite lain akan terbentuk dari kalangan yang diperintah, dan dengan perjalanan waktu akan mengambil alih kekuasaan meskipun dengan kekerasan. Sistem demokrasi, menurut Mosca tidak memiliki dasar substantif sebagai kekuasaan mayoritas, bahkan dianggap sebagai penyebab kemerosotan elite. Oleh karenanya semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewarisan secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi kekuasaannya. Akan tetapi Mosca juga menyadari, bahwa rekrutmen dari kelas mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik.

Setelah berlangsung tiga kali pemilu dalam masa reformasi, ada fenomena yang menarik kalau di dalam teori politik kontemporer elit biasanya berdasar golongan, misalnya militer, partai, birokrasi dan sebagainya. Maka belakangan muncul varian lain dari elit politik, di mana elit politik ini berbasis kekeluargaan. Kenyataan tersebut cenderung akan memupuk munculnya dinasti-dinasti politik di tingkat pusat atau lokal.

Oleh karenanya, kedekatan politik keluarga inilah yang kemudian menguatkan jaringan politik. Menurut Turner suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika jaringan tersebut. Hal tersebut berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik. Akhirnya apabila hal itu terjadi, maka dikhawatirkan menjadi budaya politik di Indonesia sehingga dikhawatirkan akan mengganggu demokratisasi secara keseluruhan. Karena menurut Chilcote budaya politik merupakan serangkaian keyakinan, simbol-simbol yang melatarbelakangi

⁹ Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 206.

¹⁰ *Ibid.*, 204

situasi di mana suatu peristiwa politik terjadi. Apabila sudah seperti ini, persoalan konsolidasi demokrasi di Indonesia boleh jadi hanya sekedar mimpi.¹¹

DEMOKRASI DAN POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA

Dari prespektif hermeneutika pandangan Dilthey, bahwa sebuah fenomena harus ditempatkan pada situasi keseluruhan yang lebih luas tempat fenomena tersebut mendapatkan maknanya, bagian-bagian memperoleh pemaknaan dari keseluruhan dan keseluruhan mendapatkan pemaknaan dari bagian-bagian. Jadi yang menjadi penekanannya bergeser dari pemahaman empatik atau rekonstruksi proses mental orang lain ke arah penafsiran hermeneutika tentang produk budaya struktur konseptual.

Fenomena demokrasi yang menghasilkan pilihan di mana terdapat keluarga dinasti sebut saja politik kerajaan adalah sebuah demokrasi sesuai prosedural yang diwarnai kapitalistik dan transaksional antara masyarakat dan calon kepala daerah tersebut yang sudah tersistematisasikan.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinasti politik, tidak ada undang-undang yang dilanggar, mulai dari konstitusi, UUD 1945 yang menjamin politik warga Negara, UU Pemda, semua aturan tidak ada yang melarang adanya politik dinasti. Dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah tidak ada melarang satu keluarga atau banyak keluarga untuk memegang posisi tertentu, larangan yang ada seperti tercantum dalam pasal 54 UU PEMDA, di tegaskan.

a) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai; pejabat negara lainnya;

hakim pada badan peradilan; pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.

b) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.

c) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Pasal 22, ditegaskan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan daerah wilayahnya, seperti;

a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c) mengembangkan kehidupan demokrasi;

d) mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

¹¹ Ronald H Chilcote, *Teori Perbandingan Politik : Penelusuran paradigma, terjemahan dari buku Theories of Comperatives Politics The Search for aFreedom oleh Haris Munandar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38-54.

- g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) melestarikan lingkungan hidup;
- l) mengelola administrasi kependudukan;
- m) melestarikan nilai sosial budaya;
- n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juga tidak ada larangan atau himbauan yang melarang terjadinya dinasti politik dalam susunan kedudukan anggota, baik MPR (DPR, DPD) maupun DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik juga tidak ada larangan partai politik mengajukan calon, baik kepala daerah, maupun calon legeslatif lebih dari satu dari satu keluarga. Semua undang-undang tidak ada yang melarang, terbentuknya dinasti politik di negeri ini.

Jika dilihat dari perspektif hukum dan undang-undang, maka tidak ada yang salah akan terbentuknya dinasti politik, baik di Indonesia, maupun di negara lain. Namun apabila dilihat dari sisi etika politik, regenerasi kepemimpinan, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan kesempatan bagi masyarakat lainnya, khususnya dari masyarakat biasa, maka dinasti politik ini akan tidak sehat. Dinasti politik cenderung akan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengeruk duit Negara, hal ini bisa kita lihat dalam dinasti Soeharto, dan Ratu Atut di Banten. Kongkalikong dilakukan untuk menguras anggaran, hal itu sangat mungkin terjadi bila dinasti politik itu telah berkembang-biak di wilayah eksekutif, legislatif, dan bahkan merembet ke arena yudikatif.

Harusnya masyarakat sadar akan dampak yang dapat ditimbulkan dengan terpeliharanya politik dinasti, di mana kekuasaan hanya berputar pada satu keluarga saja, maka semua pembangunan dan kebijakan akan ditentukan oleh satu keluarga, hal ini sangat rentang disalahgunakan sehingga rakyat akan jadi korban.

Politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, karena cenderung serakah dan tak jarang pula melakukan KKN. Pemerintahan lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Politik dinasti harus dibatasi, jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Meskipun, semua warga negara punya hak yang sama untuk berpolitik. Ini semata-mata demi kepatutan politik yang sehat dan dinamis. Meskipun berpolitik merupakan hak asasi setiap orang, politik dinasti sangat tidak baik bagi penyegaran demokrasi dan tidak baik pula untuk regenerasi politik.

Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Pergantian kekuasaan (dinasti) hanya akan diberikan kepada anggota keluarga dan

menyingkirkan orang lain, tanpa melalui proses yang fair dan bijaksana. Dinasti politik juga dianggap merusak rencana besar reformasi birokrasi. Jangan sampai birokrasi menjadi korban keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat. Birokrasi yang tidak reformatif akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme.

Dalam konteks dinasti politik cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif, dan lain-lain, politik dinasti sah-sah saja bila ditinjau dari sisi hukum dan konstitusi, namun dari sisi etika politik dan kepemimpinan, kurang elok untuk di lestarikan, untuk itu sebaiknya dinasti politik tidak dikembangkan, kecuali situasi dan kondisi mendesak, serta yang bersangkutan benar-benar berpotensi dan menduduki posisi yang ada dengan cara-cara yang fair dan melalui seleksi yang ketat, serta benar-benar kongkrit mensejahterakan masyarakat dan memajukan Bangsa dan Negara.

Sebenarnya sah-sah saja dengan politik dinasti apabila yang bersangkutan memiliki kompetensi. Tetapi dalam realitanya cenderung nihil dan dipaksakan sehingga terkesan hanya memiliki tujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan meraup proyek-proyek pemerintah. Dengan demikian, calon-calon pemimpin yang kompeten akan sulit untuk bersaing, dan demokrasi yang benar pun akan terhambat dan sulit dijalankan. Di sinilah terjadinya distorsi demokrasi yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat pada umumnya. Politik dinasti bila dibiarkan, maka akan semakin menggurita sampai ketinggian paling bawah, sehingga mengakar semakin kuat dengan mengatasnamakan demokrasi terselubung.

Tercapainya tujuan berdemokrasi adalah satu satunya cukup dengan masyarakat yang siap berdemokrasi, yaitu orang-orang yang berdemokrasi dengan dilandasi pertimbangan nilai, rasionalitas, dan ketaatan hukum. Tetapi, demokrasi macam apa yang kita harapkan dari pemilih-pemilih yang rela menjual suaranya hanya demi sesuap nasi? Pemimpin yang bagaimana yang kita harapkan jika mereka terpilih hanya karena wajahnya selalu dapat ditemui dan terpampang di baliho-baliho serta banyak dilihat?

Pertanyaannya apakah kita harus menunggu dulu masyarakat pintar baru berdemokrasi? Tentu ini bukan pilihan yang di inginkan. Justru demokrasi ini dipilih sebagai cara mencapai keadilan dan kemakmuran. Demokrasi kita masih jauh dari ideal, tetapi kita tidak boleh berhenti mencoba dan belajar. Penulis percaya bahwa tidak semua yang terlibat dalam politik sudah menjadi kotor. Masih banyak pembaharu-pembaharu yang terlibat aktif dalam politik. Tantangan mereka adalah bagaimana mengambil inisiatif dan melakukan terobosan-terobosan dalam meraih simpati masyarakat.

Kesimpulannya adalah sekalipun demokrasi mengedepankan kesamaan hak, sejatinya demokrasi memang dirancang oleh para pengagasnya simultan dengan ekonomi liberal. Artinya, di negara- negara perintis demokrasi di Barat, kesejahteraan sudah terasa, sehingga muncullah kelas menengah yang independen, yang pada gilirannya mendukung demokrasi dengan sendirinya. Resikonya apabila kesiapan kelas menengah belum merata, maka terjadi deviasi,

seperti munculnya fenomena dinasti politik. Dinasti politik muncul lantaran belum adanya kelas menengah yang mumpuni.

PENUTUP: PERLUNYA KELAS MENENGAH DI INDONESIA

Memunculkan kelas menengah yang independen adalah tugas yang segera dituntaskan oleh sistem politik Indonesia dari segi rekrutmen partai politik, pendidikan politik masyarakat, dan perundang-undangan agar keberadaan dinasti politik dapat dikritisi oleh kelompok yang secara politik memiliki kesadaran tinggi, sekaligus dari segi ekonomi mereka tidak mudah dipengaruhi. Apapun, demokrasi adalah pilihan yang mungkin agar masyarakat mendapat hak-hak kemanusiaannya. Akan tetapi Indonesia perlu menata ulang konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung, dan itu mau tidak mau harus berupaya menumbuhkan kelas menengah yang cukup banyak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, kemunculan kelas menengah yang kritis adalah sarana ampuh menguatkan demokratisasi. Hanya saja, kelas menengah hanya dapat muncul manakala pendidikan dan lapangan kerja relatif tersedia. Kelas menengah yang kritis kritis menjadi *the ruling class* di negeri ini. Sebaliknya, apabila kelas menengah tersebut diabaikan maka, boleh jadi *the ruling class* adalah golongan *status quo* yang dapat memunculkan konflik sosial setiap saat.

Dinasti politik yang menggurita akan mengantarkan Indonesia seperti yang dialami oleh Philipina, yakni munculnya dinasti politik yang berasal dari tuan-tuan tanah atau orang-orang kaya lama. Di Philipina seperti yang dituturkan Ikrar (2010), demokrasi justru menguatkan orang-orang kaya lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, David & Boyle, Kevin. *Demokrasi*. Terj. Bern. Hidayat. Yogyakarta: Kanisius., 1995.
- Chilcote, Ronald H. *Teori Perbandingan Politik : Penelusuran Paradigma, terjemahan dari buku Theories of Comperatives Politics The Search for a Freedom oleh Haris Munandar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- F. Isjwara. *Ilmu Politik*. Bandung: Angkasa. 1982.
- Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Jean, Grondin. *Sejarah Hermeneutika, Dari Plato Sampai Gadamer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Mustansyir, Rizal. *Filsafat Analitik, Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- S. Gunawan, Bondan. *Apa itu Demokrasi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia, 2010.
- Varma. *Teori Politik Modern*. Jakarta, Rajawali Press. 2007.